

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTAAGUNG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Tiada ungkapan yang pantas selain puji syukur ke Hadirat-Nya, sehingga kami dapat menerbitkan Buku Perubahan Rencana Kinerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kinerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu bahan acuan penting dalam merumuskan lebih lanjut langkah-langkah operasional yang terkait dengan Administrasi Kependudukan Tahun 2024.

Dalam buku ini disampaikan secara singkat tentang landasan hukum, Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi, Maksud dan Tujuan serta Program Prioritas dan Unggulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.

Disadari bahwa buku ini belum sempurna, maka apabila ada saran perbaikan sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaannya. Oleh sebab itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak.

Akhirnya kepada semua pihak Kami ucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungannya dalam penyelesaian Perubahan Renja tahun 2023 ini.

Kota Agung, 1 September 2023

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**



MARADONA, S.STP., M.Si
NIP. 19790903 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA – PD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.....	8
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	21
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	40
BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA-PD	42
3.1 Telahaan Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja – PD.....	56
3.3 Program dan Kegiatan.....	56
BAB IV. PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023 KABUPATEN TANGGAMUS.....	33
Tabel 2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS	39
Tabel 3. IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI KABUPATEN TANGGAMUS.....	55
Tabel 4. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023 KABUPATEN TANGGAMUS.....	67
Tabel 5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023 KABUPATEN TANGGAMUS SUMBER DANA APBD PROVINSI LAMPUNG.....	72
Tabel 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023 KABUPATEN TANGGAMUS SUMBER DANA APBN.....	73
Tabel 7. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023 KABUPATEN TANGGAMUS SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI DAN APBN.....	74

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR :
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat.

Dengan adanya Otonomi Daerah tentunya diharapkan Pemerintahan Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumberdaya daerah.

Dalam pelayanan dan mekanisme Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini Pelaksanannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang adminstrasi kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tetang tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan adminstrasi kependudukan secara daring.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang mendatang. Perencanaan yang disusun harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksi keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018- 2023 merupakan penjabaran program selama 5 tahun kedepan yang melalui setiap tahapan dari proses pembangunan berkelanjutan dari tahun ke tahun di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan mengingat pembangunan Nasional maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 -2023 disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 – 2023.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 – 2023 pelaksanaannya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap tahun selama 5 tahun, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan saling berkaitan satu dengan yang lainnya baik antar waktu maupun antar tingkatan perencanaan, dengan demikian pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat berkelanjutan dan saling terkait secara sektoral maupun wilayah.

Suatu perencanaan pembangunan apapun bentuknya akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan terkait dengan data kependudukan yang baik dan akurat. Dengan demikian pembangunan sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan barometer bagi perencanaan pembangunan sektor lainnya

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perubahan adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;
12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ;
13. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota ;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022 ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 ;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ;
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2022 ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 ;
38. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 ;

39. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai dokumen arah perencanaan Pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi dan kebijakan, program dan sasaran – sasaran strategi yang ingin dicapai selama 1 tahun mendatang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah untuk menjabarkan Capaian Anggaran dan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dokumen Perubahan Renja PD Tahun Anggaran 2023 ini terbagi dalam 4 (empat) BAB, dengan rincian sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

A. BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

B. BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan IV

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2022

- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2023
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

C. BAB III Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja-PD

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja-PD
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

D. BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA – PD TAHUN 2022 SAMPAI
DENGAN TRIWULAN IV

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 Program dan 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan Belanja Operasional sebesar Rp. 8.329.484.582,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 323.084.000,00 dengan total Belanja Daerah Rp. 8.652.568.582,00 yang teralisasi sebesar Rp. 7.968.658.928,00 atau 92,10 % sampai dengan triwulan ke IV.

Secara terinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 94,86% dengan anggaran sebesar Rp.8.556.548.382,00 yang terealisasi sebesar Rp.7.958,250.083,00 atau 93,01% dengan rincian 6 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.18.116.700,00 yang

teralisasi sebesar Rp.4.936.300,00 atau 27.25%, Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 3 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 3 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 15.501.400,00 yang terealisasi sebesar Rp.3.580.300,00 atau 23.10%
- 2.) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.444.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 444.000,00 atau 100%
- 3.) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 633.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%
- 4.) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 1 Dokumen

dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 300.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 300.000,00 atau 100%

5.) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 240.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.203.700,00 atau 84.88%

6.) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 6 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 6 Laporan dengan anggaran sebesar Rp. 240.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%

7.) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 3 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 3 Laporan dengan anggaran sebesar Rp. 758.300,00 yang terealisasi sebesar Rp.408.300,00 atau 53.84%

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai

dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.6.215.446.242,00 yang terealisasi sebesar Rp.5.755.063.161,00 atau 92,59%, Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.) Gaji dan Tunjangan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 55 Orang/Bulan dengan pencapaian kinerja sebesar 55 Orang/ Bulan dengan anggaran sebesar Rp.4.536.897.542,00 yang terealisasi sebesar Rp.4.158.333.561,00 atau 91.66%
- 2.) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 12 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 12 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.1.643.020.100,00 yang terealisasi sebesar Rp.1.578.391.000,00 atau 96.07%
- 3.) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 12 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 12 Dokumen dengan anggaran sebesar

Rp.35.528.600,00 yang terealisasi sebesar Rp.18.338.600,00 atau 51.62%

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.30.000.000,00 atau 100%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 1 Paket dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.30.000.000,00 atau 100%

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 113.33% dengan anggaran sebesar Rp. 292.408.740,00 yang terealisasi sebesar Rp.267.887.685,00 atau 91.61%, Kegiatan ini terdiri

dari 4 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 3 Paket dengan pencapaian kinerja sebesar 3 Paket dengan anggaran sebesar Rp.13.092.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 9.723.000,00 atau 74.27%
- 2.) Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 1 Paket dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.78.061.400,00 yang terealisasi sebesar Rp.75.061.400,00 atau 96.16%
- 3.) Penyediaan Bahan/Material, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 2 Paket dengan pencapaian kinerja sebesar 2 Paket dengan anggaran sebesar Rp.44.755.940,00 yang terealisasi sebesar Rp. 44.660.940,00 atau 99.79%
- 4.) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 84 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 96 Laporan dengan anggaran sebesar

Rp.156.499.400,00 yang terealisasi sebesar Rp.138.442.345,00 atau 88.46%

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.1.742.266.700,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.677.238.227,00 atau 96.27%, Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 12 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 12 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.109.781.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.84.086.367,00 atau 76,59%

2.) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 5 laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 5 Laporan dengan anggaran sebesar Rp. 1.591.307.200,00 yang terealisasi sebesar Rp.1.557.522.350,00 atau 97.88%

- 3.) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 12 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 12 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.41.178.500,00 yang terealisasi sebesar Rp.35.629.510,00 atau 86.52%
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 81.06% dengan anggaran sebesar Rp.258.310.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.223.124.710,00 atau 86,38%, Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 1 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Unit dengan anggaran sebesar Rp.40.170.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.40.095.715,00 atau 99,82%
- 2.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian

kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 4 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 4 Unit dengan anggaran sebesar Rp.153.180.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.139.358.995,00 atau 90.98%

3.) Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 33 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 8 Unit dengan anggaran sebesar Rp.26.900.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.5.670.000,00 atau 21.08%

4.) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 1 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Unit dengan anggaran sebesar Rp.38.060.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.38.000.000,00 atau 99.84%

2) Program Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 75% dengan anggaran sebesar Rp.11.892.300,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0% dengan rincian 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 75% dengan anggaran sebesar Rp.11.892.300,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 4 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 3 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.11.892.300,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%

3) Program Pencatatan Sipil, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 121.64% dengan anggaran sebesar Rp.16.328.500,00 yang terealisasi sebesar Rp.1.010.000,00 atau 6.19% dengan rincian 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 121.64% dengan anggaran sebesar

Rp.16.328.500,00 yang terealisasi sebesar Rp.1.010.000,00 atau 6.19%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 4.200 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 5.109 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.16.328.500,00 yang terealisasi sebesar Rp.1.010.000,00 atau 6.19%

4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 94.23% dengan anggaran sebesar Rp.30.169.400,00 yang terealisasi sebesar Rp.9.398.845,00 atau 31.15% dengan rincian dengan 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a.) Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.17.003.500,00 yang terealisasi sebesar Rp.

0,00 atau 0%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 32 Semester dengan pencapaian kinerja sebesar 32 Semester dengan anggaran sebesar Rp.17.003.500,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%

b.) Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 85% dengan anggaran sebesar Rp.13.165.900,00 yang terealisasi sebesar Rp.9.398.845,00 atau 71,39%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 20 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 17 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.13.165.900,00 yang terealisasi sebesar Rp.9.398.845,00 atau 71,39%

5) Program Pengelolaan Profil kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.37.630.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0% dengan rincian dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a.) Kegiatan Penyusunan profil Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.37.630.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2022 yaitu 2 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 2 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.37.630.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 Program, 9 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan

dengan Belanja Operasi sebesar Rp.8.159.920380,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.13.500.000,00 dengan total Belanja Daerah Rp.8.173.420.380,00 yang teralisasi sebesar Rp.3.254.084.432,00 atau 39,81% sampai dengan triwulan ke II.

Secara terinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dijabarkan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 51,27 % dengan anggaran sebesar Rp.8.166.735.680,00 yang terealisasi sebesar Rp.3.254.084.432,00 atau 39,85% dengan rincian 5 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 62.50% dengan anggaran sebesar Rp.10.433.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.1.010.000,00 atau 9,68%, Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 3 Dokumen dengan pencapaian kinerja

sebesar 2 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 5.557.100,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.010.000,00 atau 18,17%

- 2.) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.110.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%
- 3.) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 0 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 7.950.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%
- 4.) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 750.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%
- 5.) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 0 Dokumen

dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%

6.) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 6 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 3 Laporan dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%

7.) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 202 yaitu 3 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 3 Laporan dengan anggaran sebesar Rp. 1.020.900,00 yang terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0%

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 80,65% dengan anggaran sebesar Rp.6.228.806.540,00 yang terealisasi sebesar Rp.2.897.168.919,00 atau 46,51 %, Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Gaji dan Tunjangan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan

pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 38 Orang dengan pencapaian kinerja sebesar 38 Orang dengan anggaran sebesar Rp.4.553.403.540,00 yang terealisasi sebesar Rp.2.126.633.919,00 atau 46,70%

2.) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 12 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 6 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.635.113.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.767.185.000,00 atau 46,92%

3.) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 12 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 6 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.409.290.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.3.350.000,00 atau 8,31%

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 56,67% dengan anggaran sebesar Rp.326.886.740,00 yang terealisasi sebesar Rp.80.544.683,00 atau 24,64%, Kegiatan ini terdiri dari

4 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 1 Paket dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.51.994.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.2.700.000,00 atau 5,19%
- 2.) Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 1 Paket dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.28.311.400,00 yang terealisasi sebesar Rp.13.311.400,00 atau 47,02%
- 3.) Penyediaan Bahan/Material, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 1 Paket dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.94.531.040,00 yang terealisasi sebesar Rp.1.000.000,00 atau 1,06%
- 4.) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 27 laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 14 laporan dengan anggaran sebesar

Rp.152.050.300,00 yang terealisasi sebesar Rp.63.533.283,00 atau 41,78%

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp.1.329.121.600,00 yang terealisasi sebesar Rp.154.997.830,00 atau 11,66%, Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 12 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 6 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.188.581.500,00 yang terealisasi sebesar Rp.78.251.830,00 atau 41,49%

2.) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 10 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 5 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.1.027.340.100,00 yang terealisasi sebesar Rp.32.352.300,00 atau 3,15%

- 3.) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 12 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 6 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.113.200.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.44.393.700,00 atau 39,22%
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 75% dengan anggaran sebesar Rp.271.487.800,00 yang terealisasi sebesar Rp.120.363.000,00 atau 44,33%, Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 1 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Unit dengan anggaran sebesar Rp.40.170.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.20.458.000,00 atau 50,93%
- 2.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi

di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 5 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 5 Unit dengan anggaran sebesar Rp.159.614.800,00 yang terealisasi sebesar Rp.78.092.000,00 atau 48,93%

3.) Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 48 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 0 Unit dengan anggaran sebesar Rp.49.890.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%

4.) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 1 Gedung dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Gedung dengan anggaran sebesar Rp.21.813.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 21.813.000,00 atau 100%

2) Program Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp.348.900,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0% dengan rincian 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp.348.900,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 12 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 6 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.348.900,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%

3) Program Pencatatan Sipil, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 49,98% dengan anggaran sebesar Rp. 1.011.500,00 yang terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0% dengan rincian 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 49,98% dengan anggaran sebesar Rp. 1.011.500,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%,

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 4.200 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 2.099 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.011.500,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%

- 4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 69,23% dengan anggaran sebesar Rp.1.604.300,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0% dengan rincian dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a.) Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 69,23% dengan anggaran sebesar Rp.1.604.300,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.) Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 13 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 9 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.604.300,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%

- 5) Program Pengelolaan profil Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 0% dengan anggaran sebesar Rp.3.720.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0% dengan rincian 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - b) Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 0% dengan anggaran sebesar Rp.3.720.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1.) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 yaitu 12

Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 0
Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.
3.720.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau
0%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perubahan dan pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 KABUPATEN TANGGAMUS

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Kinerja Renja PD Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2022		Capaian Target Renstra PD s.d Triwulan II Tahun 2022	
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9=5+7	10=9/4
2	12				ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	100	100	91,22	0	0	0	91,22	91,22
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH KABUPATEN/ KOTA	100	100	91,24	0	0	0	91,24	91,24
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	86,50	0	0	0	86,5	86,50
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	2	0	0	0	2	66,67
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	0	0	0	0	0	0,00
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	0	0	0	1	100,00
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DP A-SKPD	1	1	0	0	0	0	0	0,00

2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DP A-SKPD	1	1	1	0	0	0	1	100,00
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar	6	6	6	0	0	0	6	100,00
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	0	0	0	3	100,00
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	92,29	0	0	0	92,29	92,29
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34	34	34	0	0	0	34	100,00
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86	86	86	0	0	0	86	100,00
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	0	0	0	12	100,00
2	12	01	2.05		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perangkat Daerah	100	100	100	0	0	0	100	100,00
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120,00	120,00	0	0	0	0	0	0,00

2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	96,03	0	0	0	96,03	96,03
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAK)	341	341	331	0	0	0	331	97,07
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	898	898	675	0	0	0	675	75,17
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	5	5	2	0	0	0	2	40,00
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/ Material	927	927	927	0	0	0	927	100,00
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84	84	78	0	0	0	78	92,86
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	57,67	0	0	0	57,67	57,67
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	0	0	0	12	100,00
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26	26	5	0	0	0	5	19,23
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	12	0	0	0	12	100,00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	86,08	0	0	0	86,08	86,08
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	1	0	0	0	1	100,00

2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	4	4	0	0	0	4	100,00
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	20	16	0	0	0	16	80,00
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	1	0	0	0	1	100,00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100	100	96,56	0	0	0	96,56	96,56
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	100	100	96,56	0	0	0	96,56	96,56
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penerbitan dan Penerbitan Dokumen atas Laporan Peristiwa Penting	4.200	4.200	4.032	0	0	0	4.032	96,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100	100	81,80	0	0	0	81,80	81,80
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100	100	93,12	0	0	0	93,12	93,12
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2	2	2	0	0	0	2	100,00
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	100	71,51	0	0	0	71,51	71,51
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	20	20	14	0	0	0	14	70,00

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleknya tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD – SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun, hal ini belum didukung dengan sarana dan prasarana, sumberdaya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini bisa optimal.

Sebagai gambaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang cukup menonjol adalah pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan penerbitan dokumen Akta Kelahiran sesuai standar SPM penerbitan KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 5 tahun selalu memenuhi target SPM sebesar 100%. Hal ini didasari oleh memadainya SDM/aparat yang melayani di Bidang tersebut. Namun sampai saat ini laporan perkembangan kependudukan dari tingkat pekonmasih banyak yang belum melaporkan dan walaupun melaporkan belum secara continue. Ketertiban masyarakat masih perlu peningkatkan kinerja aparat maupun bimbingan serta dukungan dari masyarakat misalnya pada cakupan pembuatan KTP dan Akta Kelahiran. Kesadaran masyarakat masih sangat minim, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil. Masyarakat masih belum menyadari sepenuhnya terhadap pentingnya memiliki dokumen kependudukan baik berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta-akta Pencatatan Sipil. Hal ini disebabkan masih belum terlaksananya dengan baik pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia

dalam pengelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Bimtek ataupun Diklat dan Penyuluhan maupun sejenisnya.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dapat dilihat dalam Tabel 2, dibawah ini :

Tabel 2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SPM													
A	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk													
1	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk													
a	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	45.000		50.300	52.800	53.200	41.871	53.700	56.438	53.825	55.200	43.985	53.700	
B	Penerbitan Kartu Keluarga													
1	Penerbitan Kartu Keluarga													
a	Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	37.000		35.400	45.700	45.900	46.200	50.154	37.727	54.579	46.300	49.637	50.154	
C	Penerbitan Akta Kelahiran													
1	Penerbitan Akta Kelahiran													
a	Penerbitan Akta Kelahiran	21.700		17.500	18.600	20.100	21.700	24.500	16.040	24.653	25.500	23.644	24.500	

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sebagai berikut :

1. Terindikasi masih ada penduduk Kabupaten Tanggamus yang belum terdaftar dalam database kependudukan;
2. Adanya tidak kesesuaian data/identitas antara database kependudukan dengan dokumen lain seperti ijazah, surat/akad nikah, serta berbagai intervensi pembangunan seperti Jamkesmas dan lain-lain;
3. Belum semua PD melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan;
4. Masih rendahnya capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi kependudukan untuk masa yang akan datang, terfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, terutama :

1. Peningkatan cakupan ID Digital;
2. Peningkatan dan pemantapan pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK);
3. Peningkatan sumber daya aparatur;
4. Peningkatan kualitas pelayanan penerbitan Administrasi Kependudukan;
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan.

Dengan demikian harapan yang diinginkan pada kondisi mendatang adanya upaya dalam penyiapan perumusan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga perkembangan kependudukan proyeksi dan penyesuaian kebijakan kependudukan baik dalam hal perencanaan serta monitoring dan evaluasi kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN RENJA-PD

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunantahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dinamika pandemic COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Gambar III.1. Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2023



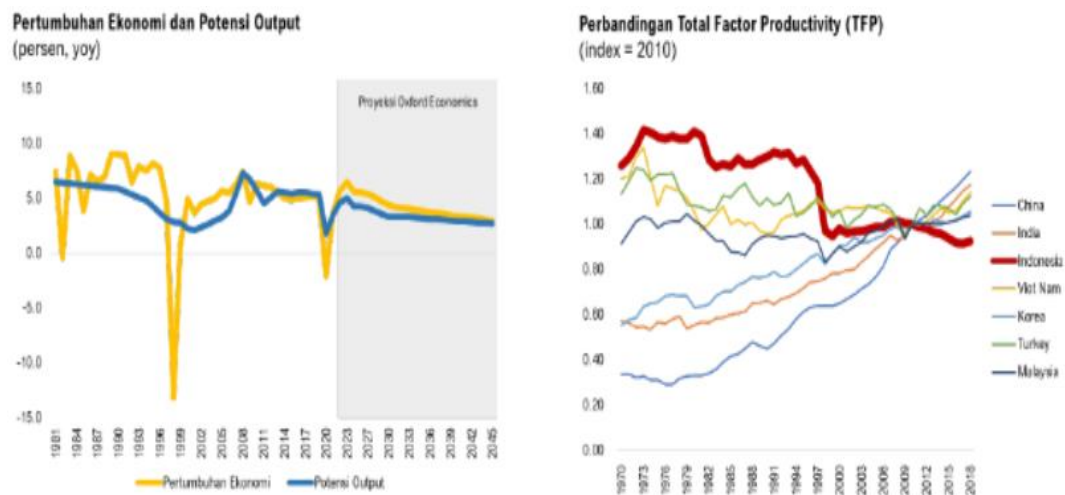
Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2023

Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi 2,07 persen, pertama kali sejak krisis tahun 1998. Belajar dari pengalaman krisis di Indonesia tahun 1998, diperlukan upaya yang kuat dan konsisten untuk mengembalikan trajektori pertumbuhan ekonomiseperti sebelum krisis.

Dengan menggunakan skenario business as usual (BAU), pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia pasca-Covid-19 diproyeksikan akan terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2045. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas Indonesia dibandingkan negara setara dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Gambar III.2 Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Produktivitas.



Sumber : BPS, Oxford Economics, Asian Productivity Database, 2023

Penurunan produktivitas tersebut harus segera diatasi melalui redesain transformasi ekonomi Indonesia. Urgensi redesain transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah-panjang. Pascapandemi Covid-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi dari rata-rata 5,7 persen menjadi 6,0 persen sampai dengan tahun 2045 untuk keluar dari MIT dan menjadi Negara maju. Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sector informal yang bernilai tambah relative rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.

Redesain transformasi ekonomi juga untuk menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomasi dan digitalisasi, artificial intelligence (AI) dan big data, disrupsi rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi telework. Selain itu, paradigma pembangunan beralih kepada ekonomi hijau.

Pada tahun 2022, pemerintah melalui kebijakan pemulihan ekonomi dan reformasi structural mendorong sisi permintaan dan sisi penawaran untuk memulihkan utilitas dan mengembalikan pertumbuhan potensial pada level sebelum pandemi. Selanjutnya, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut akan menjadi landasan dalam mendorong proses transformasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

Transformasi ekonomi Indonesia dilaksanakan pada seluruh daerah. Provinsi Bali, yang paling terdampak negatif pandemi menjadi daerah percontohan atau pilot project melalui pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera. Dalam jangka menengah-panjang, transformasi ekonomi Bali dilakukan melalui (1) Bali Pintar dan Sehat, (2) Bali Produktif, (3) Bali Hijau, (4) Bali Terintegrasi, (5) Bali Smart Island, dan (6) Bali Kondusif. Semangat transformasi ekonomi yang dilakukan di Provinsi Bali menjadi praktik baik

yang perlu diadopsi oleh provinsi lain melalui penyelarasan strategi jangka menengah-panjang dengan transformasi ekonomi Indonesia.

Tantangan besar masih akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia, antara lain masih terdapatnya scars akibat krisis Covid-19, yaitu learning loss, belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha secara optimal, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar. Untuk itu, transformasi ekonomi perlu dilakukan secara inklusif melalui tiga pilar yaitu (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Selain itu, pemerintah saat ini perlu meninggalkan legacy pembangunan sebagai landasan bagi pemerintahan berikutnya untuk lepas landas sehingga penciptaan lapangan kerja, penciptaan efek pengganda terhadap perekonomian dan peningkatan produktivitas perekonomian jangka menengah-panjang tetap berkelanjutan. Tanpa adanya intervensi kebijakan strategis, produktivitas dan daya saing Indonesia diperkirakan akan semakin menurun. Untuk mengejar gap pertumbuhan agar tetap sejalan dengan target keluar dari middle-income trap maka transformasi ekonomi yang didorong melalui peningkatan produktivitas menjadi semakin penting.

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Gambar III.3. Kerangka Pikir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2023

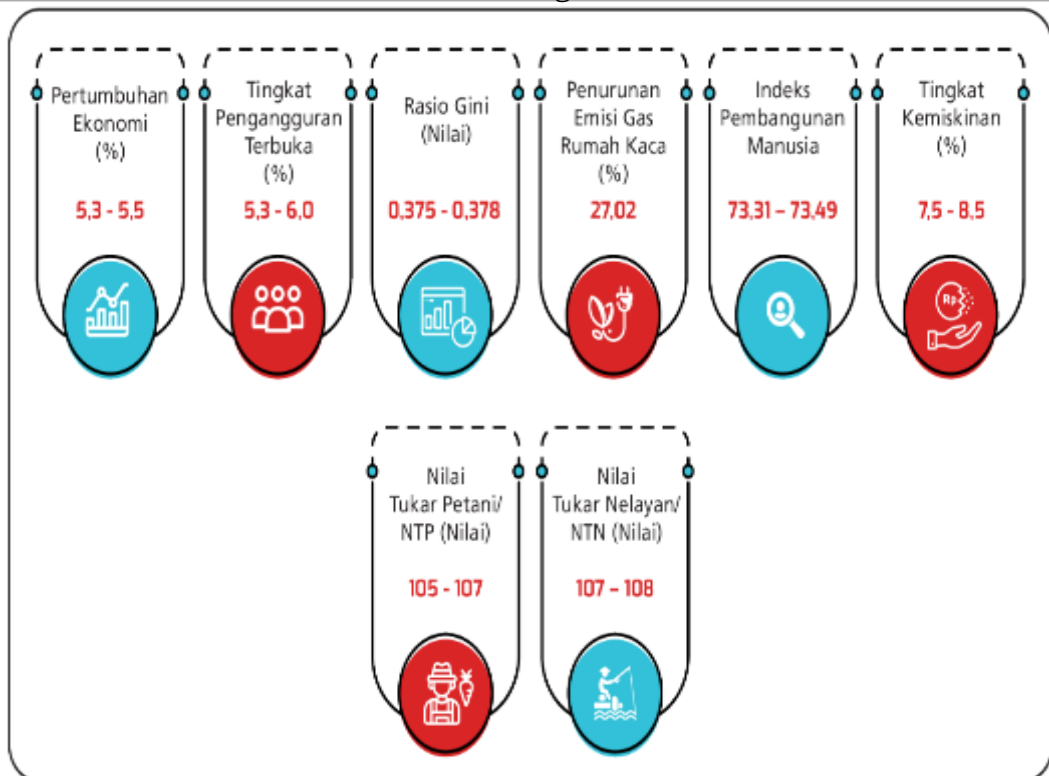
Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

- 1) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Lebih lanjut, target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 ditunjukkan oleh infografis sebagai berikut.

Gambar III.4 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas, 2023

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, (3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, (4) mendorong pemulihan dunia usaha, (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Gambar III.5 Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2023
Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam

RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Gambar III.6 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2023

Dalam tujuh PN pada RKP 2023, arah kebijakan masing-masing PN adalah untuk mewujudkan strategi pembangunan tahun 2023 dalam rangka meningkatkan produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Secara rinci sasaran dari masing-masing PN diuraikan sebagai berikut:

PN1



Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
- (2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

PN2



Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
- (2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

PN3



Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

- (1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam

- (4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- (5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
- (6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.

PN4



Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

- (1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
- (2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
- (3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
- (2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 Km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*), (c) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara;
- (3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
- (4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
- (5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

PN6



Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- (2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
- (3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

PN7



Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

- (1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- (2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
- (3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
- (4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;
- (5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang berpenduduk.

Pencapaian tujuh PN di atas didukung oleh pelaksanaan 45 proyek

prioritas strategis/Major Project (MP) sebagai leverage point yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2023. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, disebutkan bahwa MP dirancang sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN

tahunannya. Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan Major Project dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Penerapan mekanisme Clearing House (CH) dalam perencanaan MP yang telah dimulai pada RKP Tahun 2022 tetap dilaksanakan dan dipertajam pada RKP Tahun 2023. Penajaman mekanisme CH bertujuan untuk menjamin tercapainya output MP dan dipastikan bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024 (not only sent but delivered). Penajaman antara lain meliputi (1) optimalisasi integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional; (2) penguatan mekanisme CH dalam penyusunan cascading, executive summary, dan info memo MP; serta (3) intensifikasi pelibatan stakeholder dalam mekanisme CH melalui rangkaian pertemuan multipihak (trilateral/multilateral meeting) guna memastikan komitmen para pihak mulai dari perencanaan hingga implementasi MP yang berorientasi pada pencapaian output MP pada tahun 2024.

Identifikasi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI LAMPUNG

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
A	Nasional		
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Terwujudnya Pemberian NIK pada setiap penduduk 2. Terwujudnya Perencanaan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan	Renstra Kementrian	
2	1. Terwujudnya Digitalisasi Administrasi kependudukan Untuk Pelayanan Publik	RAKORNAS Disdukcapil	
B	Provinsi		
1	Kebijakan Misi Ketiga : 1. Mendukung Pelaksanaan Program KTP-el 2. Melakukan Pembinaan di bidang Kependudukan 3. Melakukan Pembinaan di bidang Catatan Sipil sehingga diketahui jumlah Kelahiran, Kematian atau LAMPID diprovinsi Lampung	Renstra Provinsi	

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja – PD

Tujuan

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Sasaran

- Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
- Meningkatnya Kepemilikan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 Program, 9 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan dengan Belanja Operasi sebesar Rp.8.159.920.380,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.13.500.000,00 dengan total Belanja Daerah Rp.8.173.420.380,00, berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja tahun 2023 mengalami Pengurangan Anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 Program, 9 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan dengan Belanja Operasi sebesar Rp.7.842.716.856,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.239.264.500,00 dengan total Belanja Daerah Rp.8.081981.356,00.

Secara terinci Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dijabarkan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.8.153.235.680,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.89.579.024,00 sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 8.007.156.656,00 dengan rincian 5 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a)Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.10.433.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp. 5.956.300,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 4.476.700,00, Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp. 5.557.100,00 mengalami pengurangan sebesar Rp. 3.405.400,00 sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 2.151.700,00.

2.) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.110.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp. 735.000,00 sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 375.000,00.

3.) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di

Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp. 795.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp. 420.000,00 sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 375.000,00.

- 4.) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.750.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.375.000,00 sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.375.000,00.
- 5.) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.600.000,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran.
- 6.) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.600.000,00 mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.375.000,00 sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 225.000,00.
- 7.) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.020.900,00 mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.645.900,00 sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 375.000,00.

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.6.228.806.540,00 mengalami pengurangan sebesar Rp. 173.721.424,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 6.055.085.116,00, Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1.) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.4.553.403.540,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.137.488.424,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 4.415.915.116,00.
 - 2.) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.1.635.113.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp. 10.803.000,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 1.624.310.000,00.
 - 3.) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.40.290.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp. 25.430.000,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 14.860.000,00.
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.326.886.740,00 mengalami pengurangan sebesar

Rp.23.033.300,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.303.853.440,00, Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.51.994.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.12.901.000,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.39.093.000,00.

2.) Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.28.311.400,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.3.000.000,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 25.311.400,00.

3.) Penyediaan Bahan/Material, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.94.531.040,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.6.510.000,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 88.021.040,00.

4.) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.152.050.300,00 mengalami pengurangan sebesar Rp. 622.300,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 151.428.000,00

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.329.121.600,00 mengalami penambahan sebesar Rp. 162.345.500,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 1.491.466.600,00, Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.188.581.500,00 mengalami penambahan sebesar Rp. 13.485.000,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 202.066.500,00.

2.) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.1.027.340.100,00 mengalami penambahan sebesar Rp. 163.537.000,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.1.190.877.100,00.

3.) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.113.200.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.14.677.000,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.98.523.000,00.

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.271.487.800,00, mengalami pengurangan sebesar Rp.49.213.000,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 222.274.800,00 Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.40.170.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.5.632.000,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.34.538.000,00.
- 2.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.159.614.800,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.37.011.000,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.122.603.800,00.
- 3.) Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.49.890.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.6.570.000,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.43.320.000,00.

- 4.) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.21.813.000,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran.
- 2) Program Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp. 348.900,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran, Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp. 348.900,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1.) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp. 348.900,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran.
- 3) Program Pencatatan Sipil, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.1.011.500,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran, Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.1.011.500,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.1.011.500,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran.

4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.1.604.300,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran, Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a.) Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.1.604.300,00 dan tidak mengalami perubahan

anggaran, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.1.604.300,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran.

5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.3.720.000,00 mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.1.860.000,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.1.860.000,00, Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

b) Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp.3.720.000,00 mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.1.860.000,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.1.860.000,00, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan anggaran sebesar Rp. Rp.3.720.000,00 mengalami pengurangan anggaran

sebesar Rp.1.860.000,00 Sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.1.860.000,00.

Adapun hal – hal tersebut diatas selanjutnya disajikan dalam tabel 4,5,6 dan 7 sebagai berikut :

Tabel 5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2022 KABUPATEN TANGGAMUS SUMBER DANA APBD PROVINSI LAMPUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan		Rencana Tahun 2022											Prakiraan Maju Tahun 2023		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Tabel 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2022 KABUPATEN TANGGAMUS SUMBER DANA APBN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan		Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Tahun		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Tabel 7. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2022 KABUPATEN TANGGAMUS SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI DAN APBN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerint ahan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Pagu Indikatif Tahun 2023	Indikator kinerja							
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
2	12			Ko taagung Timur		100 %		100 %		100 %	8.652.568.582	8.173.420.380	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten					
2	12	01		Ko taagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 %		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 %	8.556.548.382	8.166.735.680	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten				
2	12	01	2.01	Ko taagung Timur	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu Keuangan	100 %		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu Keuangan		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu Keuangan	100 %	18.116.700	10.433.000	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten				
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Ko taagung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keuangan		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keuangan	3	Dokumen	3	Dokumen	15.501400	5.557.100	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Ko taagung Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	444.000	1110.000	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Per ubahan RKA- SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Ko taagung Timur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	633.000	795.000	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Keuangan	1	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Keuangan	1	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Keuangan	1	Dokumen	300.000	750.000	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Keuangan	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Keuangan	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Keuangan	1	Dokumen	240.000	600.000	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keuangan	6	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keuangan	6	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keuangan	6	Laporan	240.000	600.000	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keuangan	3	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keuangan	3	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keuangan	3	Laporan	758.300	1020.900	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kotaagung Timur	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	100	%	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	100	%	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	100	%	6.215.446.242	6.228.806.540	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	Orang	4.536.897.542	4.553.403.540	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12	Dokumen	1643.020.100	1635.113.000	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	35.528.600	40.290.000	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Kotaagung Timur	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100	%	100	%	30.000.000	0	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1,00	Paket	1,00	Paket	30.000.000	0	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kotaagung Timur	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	100	%	100	%	292.408.740	326.886.740	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	3	Paket	13.092.000	51994.000	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1	paket	1	paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1	paket	78.061.400	28.311.400	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	44.755.940	94.531.040	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84	Laporan	84	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84	Laporan	156.499.400	152.050.300	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kotaagung Timur	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100	%	100	%	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100	%	1.742.266.700	1.329.121.600	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	109.781.000	188.581.500	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Perakitan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perakitan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	5	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perakitan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	1.591.307.200	1.027.340.100	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	41.178.500	113.200.000	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kotaagung Timur	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	100	%	100	%	258.310.000	271.487.800	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	Unit	40.170.000	40.170.000	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	4	Unit	153.180.000	159.614.800	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33	Unit	33	Unit	26.900.000	49.890.000	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	38.060.000	218.13.000	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	32	Dokumen	32	Dokumen	32	Dokumen	17.003.500	1.604.300	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	04	2.03		Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Kotaagung Timur	Persentase Data informasi yang dimuat di Website dan media sosial	100	%	100	%	100	%	13.165.900	0	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	20	Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	13.165.900	0	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			Kotaagung Timur	Persentase Profil Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	100	%	100	%	100	%	37.630.000	3.720.000	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan			Kotaagung Timur	Persentase penerbitan buku Profil Kependudukan	100	%	100	%	100	%	37.630.000	3.720.000	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	05	2.01	02	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Ditopang oleh Efisiensi Struktur Pemerintahan, Kapasitas Pegawai Pemerintah dan Lembaga Legislatif	Kotaagung Timur	Jumlah data Kependudukan Kabupaten/ Kota	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	37.630.000	3.720.000	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
JUMLAH																8.652.568.582	8.173.420.380			

BAB IV

PENUTUP

Sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah, pembangunan Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berkembang sebagai dampak penerapan Otonomi Daerah di Kabupaten Tanggamus. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan terjadi deviasi / distorsi perubahan sasaran yang akan dicapai. Untuk itu diperlukan adanya upaya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap program – program yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan atau dilaksanakan secara sistematis dan terencana.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 tidak terlepas dari kearifan dan konsistensi pihak eksekutif dan legislative selaku daerah dalam menyikapi situasi dan kondisi yang dinamis. Penekanan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus ini tidak lain adalah sebuah garis kebijaksanaan yang disusun untuk menjawab bagaimana Kabupaten Tanggamus dibangun, khususnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menyikapi tentang perubahan undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan sosialisasi tingkat Kabupaten, Kecamatan, Pekon, RT, RW dan kepada semua lapisan masyarakat;

- Meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan mengutamakan pelayanan Online, dalam rangka menyambut Digitalisasi Pelayanan.

Perubahan Renja 2023 ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan, mutlak diperlukan sebagai jaminan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proses layanan Administrasi Kependudukan.

Kotaagung, 1 September 2023

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kab. Tanggamus**



MARADONA, S.STP., M.Si

NIP. 19790903 199810 1 001

